

TESIS

**PENGARUH TRANSFER FISKAL DAN DANA DESA
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

**THE EFFECT OF FISCAL TRANSFER AND VILLAGE FUND
ON INCOME INEQUALITY IN INDONESIA**

**NAJAMUDDIN ARFAH
A032 17 1008**



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH TRANSFER FISKAL DAN DANA DESA
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

**THE EFFECT OF FISCAL TRANSFER AND VILLAGE FUND
ON INCOME INEQUALITY IN INDONESIA**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NAJAMUDDIN ARFAH
A032 17 1008**



Kepada:

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH TRANSFER FISKAL DAN DANA DESA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

NAJAMUDDIN ARFAH

A032171008

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **9 Februari 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasihat

Pembimbing Utama



Dr. Madris, SE., DPS., M.Si
NIP 196012311 98811 1 002

Pendamping Pembimbing



Dr. Sultan Suhab, S.E., M.Si
NIP 19691215 199903 1 002

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan



Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA.
NIP 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najamuddin Arfah

NIM : A032 171008

Program Studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan
Universitas Hasanuddin Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul


**PENGARUH TRANSFER FISKAL DAN DANA DESA TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 254 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Februari 2021

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
Rp 6000
ENAM RIBU RUPIAH
BB5EAMF522504885
Najamuddin Arfah
NIM. A032171008

PRAKATA

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas rahmat serta karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan segala hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul **“Pengaruh Transfer Fiskal dan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”**. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah sepanjang zaman.

Alasan penulis mengangkat ketimpangan pendapatan sebagai bahan penelitian karena melihat persoalan ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia.

Kebijakan penyaluran dana desa tentu menjadi pelengkap dari transfer fiskal yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan angka ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kebijakan ini perlu diteliti lebih komprehensif apakah telah mampu berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penulis ingin mengetahui seberapa jauh dampak transfer fiskal dan penyaluran dana desa terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penulis menyadari, dalam tesis ini tentunya masih jauh dari sempurna, sebuah karya ilmiah yang masih terdapat kekurangan dan keterbatasan di dalam penyajiannya. Namun, dengan keterbatasan tersebut, menjadi spirit dan semangat bagi penulis dalam melahirkan karya-karya terbaik selanjutnya.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, tentu dengan segala doa, usaha dan bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar Bapak Prof. D. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., Ketua Program Studi Magister Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Ibu Dr Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA serta ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Madris, SE.,

DPS., M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. Sultan Suhab, SE., MS sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, spirit, semangat, arahan dan bimbingannya selama penulis menyelesaikan tesis ini. Mereka-lah yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk senantiasa menyajikan yang terbaik dalam penulisan tesis ini. Pun juga penulis mengucapkan terima kasih kepada tim penguji, Ibu Prof. Dr. Rahmatia, SE., M.A yang telah banyak memberikan saran dan masukan atas perbaikan tesis penulis, juga kepada Bapak Dr. Sabir, SE.M.Si sebagai penguji dan Bapak Dr. Paulus Uppun, SE., MA. Kritikan dan masukan dari tim penguji, menjadi bahan perbaikan penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S2 Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas) tentu ucapan terima kasih atas ilmu yang telah dibagi selama berinteraksi dengan penulis baik di ruangan kelas maupun di luar kelas.

Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik. Terima kasih pula kepada teman-teman Pascasarjana jurusan Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (EPP) Unhas angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan moril serta kerja samanya.

Tak lupa ucapan terima kasih penulis kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Pengurus Besar HMI Periode 2018-2020, Pengurus HMI Cabang Makassar dan seluruh alumni HMI yang telah banyak memberikan semangat, doa dan dukungan serta perhatian sehingga penulis berkeyakinan mampu menyelesaikan tesis ini, *yakin usaha sampai!*

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat, salam ta'zim dengan dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas doa dan keikhlasan kedua orang tua, Ayahanda almarhum Arfah Razak, serta Ibunda Almarhumah Marwah dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis. Keduanya adalah orang yang luar biasa dalam memberikan kasih sayang serta harapan kepada penulis.

Meski keduanya sudah tidak lagi kebersamai penulis, namun penulis yakin berkat doa dan harapannyalah yang terus-menerus kebersamai penulis yang akhirnya mampu menyelesaikan tesis ini sebagai syarat penyelesaian Studi Magister di Unhas. Maha suci Engkau ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Engkau memberi hikmah kepada siapa saja yang dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. *Wallahu'alam*.

Makassar, Februari 2021

Najamuddin Arfah

ABSTRAK

NAJAMUDDIN ARFAH . *Pengaruh Transfer Fiskal dan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia* (dibimbing oleh Madris dan Sultan Suhab).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara langsung dan tidak langsung Transfer Fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia melalui Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series* dari tahun 2015 hingga 2018 dan data panel 33 provinsi di Indonesia . Dalam penelitian ini menggunakan metode *analisis path* dengan menggunakan software *SPSS 22*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transfer Fiskal dalam bentuk DAK secara langsung tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Namun secara tidak langsung melalui Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Studi ini juga menunjukkan bahwa Dana Desa secara langsung maupun tidak langsung melalui pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap Ketimpangan pendapatan. Ini artinya, sejak digulirkannya Dana Desa dari tahun 2015 hingga 2018 belum maksimal menurunkan ketimpangan pendapatan, tetapi justru berpengaruh meningkatkan ketimpangan pendapatan. Belum maksimalnya kucuran Dana Desa terhadap penurunan ketimpangan disebabkan oleh belum tepat sasaran penggunaan dana desa terutama di bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Selain itu, anggaran dana desa yang fokus pada pembangunan dan infrastruktur desa hanya dinikmati oleh kelompok elit di desa yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan justru meningkat.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, DAK, Dana Desa, dan Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

NAJAMUDDIN ARFAH. *The Effect of Fiscal Transfers and Village Funds on Income Inequality in Indonesia (supervised by Madris and Sultan Suhab).*

This study aims to see and analyze the direct and indirect effects of Fiscal Transfers in the form of Special Allocation Funds or known as Dana Alokasi khusus (DAK) and Village Funds as known as Dana Desa on Income Inequality in Indonesia through Human Development as measured by the Human Development Index (IPM). The data used in this study are secondary data, from 2015 to 2018 and a panel of data from 33 provinces in Indonesia. This study uses path analysis method using SPSS 22 software.

The results of this study indicate that the Fiscal Transfer in the form of DAK does not directly affect Income Inequality in Indonesia. However, indirectly through Human Development has a significant effect on Income Inequality in Indonesia. This study also shows that the Village Fund directly or indirectly through human development has a positive effect on income inequality. This means, since the launch of the Village Fund from 2015 to 2018 it has not maximally reduced income inequality, instead had an effect on increasing income inequality. The disbursement of Village Funds has not been maximized to reduce inequality due to the inadequate use of village funds, especially in the field of empowerment and development of village communities. In addition, the village fund budget that focus on village development and infrastructure is only enjoyed by elite in the village which results in increased income inequality.

Keywords: Income Inequality, DAK, Village Funds, and Human Development.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Konseptual.....	12
2.1.1 Konsep dan Teori Ketimpangan Pendapatan.....	12
2.1.2 Indikator Pengukuran Ketimpangan Pendapatan.....	17
2.2 Tinjauan Teori	20
2.1.2 Teori Transfer Fiskal.....	20
2.2.3 Teori Pengeluaran Pemerintah	22
2.3 Hubungan antar Variabel	25

2.3.1 Hubungan Transfer Fiskal dengan Ketimpangan Pendapatan	25
2.3.2 Hubungan Dana Desa dan Ketimpangan Pendapatan.....	29
2.3.3 Hubungan Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan	30
2.3.4 Hubungan Transfer Fiskal, Dana Desa dan Ketimpangan Pendapatan	31
2.3.5 Hubungan Transfer Fiskal, Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan.....	34
2.4 Tinjauan Empiris	38
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS	45
3.1 Kerangka Pemikiran	45
3.2 Hipotesis	47
BAB IV METODE PENELITIAN	48
4.1 Jenis dan Sumber Data.....	48
4.2 Metode Pengumpulan Data.....	48
4.3 Metode Analisis	49
4.3.1 Analisis Deskriptif	49
4.3.2 Analisis Kuantitatif	49
4.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Gambaran Umum Kinerja Makro Ekonomi Nasional	52
5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2015-2018	52
5.1.2 Pendapatan Perkapita Nasional 2015-2018	53
5.1.3 Ketimpangan Pendapatan Nasional 2015-2018	54

5.2 Deskripsi Data	55
5.2.1 Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Indonesia 2015-2018.....	55
5.2.2 Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia 2015-2018	57
5.2.3 Dana Desa per Provinsi di Indonesia 2015-2018	60
5.2.4 Dana Alokasi Khusus per Provinsi di Indonesia 2015-2018.....	62
5.3 Hasil Analisis	64
5.4 Pembahasan	67
5.4.1 Pengaruh Transfer Fiskal Terhadap Pembangunan Manusia	67
5.4.2 Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Manusia	68
5.4.3 Pengaruh Transfer Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan	70
5.4.4 Pengaruh Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan	71
5.4.5 Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan	74
5.4.6 Pengaruh Tidak Langsung Transfer Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pembangunan Manusia	76
5.4.7 Pengaruh Tidak Langsung Transfer Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pembangunan Manusia	77
BAB VI PENUTUP	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
3.1 Kerangka Pemikiran	47
5.1 Perkembangan Gini Ratio Provinsi di Indonesia Periode 2015 dan 2018	56
5.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia 2015 dan 2018	59
5.3 Perkembangan Dana Desa Per Provinsi 2015 dan 2018	61
5.4 Perkembangan Dana Alokasi Khusus per Provinsi 2015 dan 2018	63

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Kriteria Ketimpangan Berdasarkan Indeks Gini	17
5.1 Tabel Hasil Analisis Pengaruh Langsung Antar Variabel	64
5.2 Tabel Hasil Analisis Pengaruh tidak Langsung Antar Variabel	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006).

Konsep pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua entitas konsep ekonomi yang saling terkait antara satu dan yang lainnya. Pembangunan ekonomi sangat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi Indonesia. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sudah jelas bahwa pembangunan memerlukan *Product Domestic Bruto* (PDB) yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Namun masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuhkan PDB, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan PDB, sejumlah besar masyarakat yang ada di dalam sebuah negara atukah hanyalah segelintir orang di dalamnya. Jika yang menumbuhkannya hanyalah orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Namun jika pertumbuhan dihasilkan oleh orang banyak, mereka pulalah yang akan memperoleh manfaat terbesarnya, dan buah pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara merata. Oleh karena itu, banyak negara berkembang yang dalam

sejarahnya menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menemukan bahwa pertumbuhan semacam itu kurang memberikan manfaat kepada kaum miskin. (Michael P Todaro, Stephen C Smith, 2004).

Salah satu isu yang menjadi sorotan banyak negara saat ini khususnya di negara berkembang adalah ketimpangan pendapatan (*income inequality*). Ketimpangan menjadi isu serius bagi negara-negara berkembang saat ini karena seringkali pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai indikator pembangunan ekonomi yang berhasil justru melahirkan ketimpangan yang melebar di negara tersebut. Di banyak negara bekas jajahan di Asia, Afrika dan Amerika Latin, tidak terdistribusinya pendapatan yang merata mengakibatkan konsentrasi kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir penduduk di negara tersebut. Padahal di satu sisi persoalan ketimpangan kekayaan adalah masalah yang menghambat proses pembangunan ekonomi.

Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi asal India, terhitung sudah dua kali mengubah arus utama pemikiran tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan. Diskursus dan praktek ekonomi pembangunan tradisional berpusat pada pendapatan (*income*) sebagai ukuran utama kesejahteraan. Berangkat dari asumsi bahwa pendapatan warga negara menjadi kunci keberhasilan pembangunan, maka negara-negara yang tergolong dalam kategori negara berkembang saling berlomba meningkatkan pendapatan rata-rata nasional sebagai ujung dari tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan oleh IMF dan Bank Dunia.

Sekitar akhir dasawarsa 1980, pusat perhatian tentang konsep pembangunan mulai berubah. Realitas menampilkan bahwa ternyata persoalan

kemiskinan bukan hanya sekadar soal kurangnya pendapatan, tetapi juga mencakup masalah tentang luas penurunan kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang tidak bisa diukur oleh konsep pendapatan semata. Yang menjadi persoalan adalah sifat dan kualitas keberlanjutan dari pendapatan tersebut bagi seseorang. Berangkat dari realitas tersebut, Sen kemudian mengajukan pendekatan yang memasukkan kapabilitas untuk mengganti pendapatan sebagai ukuran pembangunan (Sen, 1999). Dengan dimasukkannya konsep baru tersebut. Sen memperluas pengertian pembangunan, dari sekadar urusan sempit agen-agen pemerintah dalam rangka menangani berbagai persoalan ekonomi untuk peningkatan pendapatan rata-rata warganya secara kuantitatif, menjadi persoalan lebih luas mencakup faktor kualitatif.

Pada era 2000-an, Sen kembali menggeser pengertiannya tentang konsep pembangunan dengan menambahkan faktor “kebebasan” ke dalamnya (Sen, 2000). Menurut Sen kebebasan tidak hanya sebagai sarana, tetapi lebih dari itu menjadi tujuan dalam pembangunan. Negara dan pemerintah mestinya tidak hanya menjadikan pendapatan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, tetapi juga peningkatan kapabilitas dan kebebasan warga dalam memajukan potensinya sebagai manusia (Oekan S Abdoellah & Dede Mulyanto, 2019).

Indonesia, sebagai negara yang berkembang juga berhadapan dengan persoalan ketimpangan. Meski sejak merdeka pada tahun 1945 pertumbuhan ekonomi di Indonesia trennya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun persoalan ketimpangan masih menjadi masalah yang menghantui proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Problem ketimpangan, menurut Didin S. Damanhuri (Eka Sastra, 2017) mengungkapkan, jika problem ketimpangan

dalam pembangunan ekonomi di Indonesia di samping sebagai akibat dari kesalahan strategi pembangunan, juga terjadi karena ada faktor-faktor yang berasal dari dalam (*endogen*). Hal inilah yang menyebabkan lebih sulitnya Indonesia mengawinkan pertumbuhan dan pemerataan.

Selama satu dua dasawarsa terakhir, persoalan ketimpangan distribusi pendapatan masih menghantui pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Data Pusat Statistik (BPS) menunjukkan beberapa provinsi masih menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Meski pertumbuhan ekonomi dekade terakhir di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, namun belum diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan secara signifikan. Sebagai negara berkembang, fenomena ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Ketimpangan distribusi pendapatan lebih besar di negara-negara yang baru memulai pembangunan, sedangkan negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Todaro (2008) menjelaskan bahwa, negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang.

Sejak 2000 hingga 2017, Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) per kapita meningkat rata-rata 4 persen setiap tahun, setelah China dan India, yang masing-masing tumbuh 9 persen dan 5,5 persen per tahun. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antar penduduk. Data dari Bank Dunia mengungkapkan Indeks Gini Indonesia meningkat dari 30,0 pada dekade 1990-an menjadi 39,0 pada 2017.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan di Indonesia mulai meningkat pada awal 1990-an. Krisis moneter 1998 sempat menurunkan ketimpangan di Indonesia karena krisis tersebut berdampak signifikan terhadap kalangan orang kaya pada saat itu. Namun, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin kembali meningkat cepat setelah tahun 2000. Indeks Gini naik dari 0,31 pada tahun 2001 menjadi 0,41 pada tahun 2014. Meski sejak tahun 2015, angka ketimpangan distribusi pendapatan mulai kembali menurun, namun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Angka indeks gini ratio masih 0,38 pada tahun 2018.

Terjadinya kenaikan ketimpangan di Indonesia utamanya disebabkan oleh pendapatan yang meningkat lebih cepat di kalangan rumah tangga terkaya dibandingkan dengan rumah tangga termiskin. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (2014) mencatat bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan tingkat konsumsi rumah tangga terkaya tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan dengan kelas menengah ke bawah. Sekitar 60% rumah tangga termiskin memiliki pertumbuhan tingkat konsumsi tahunan di bawah rata-rata. Laporan Bank Dunia pada 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20 persen kelompok terkaya. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelas konsumen. Mereka adalah orang-orang yang berpendapatan bersih per tahun di atas 3.600 dollar AS atau Rp.52,6 juta dan pengeluaran per hari nya sekitar 10 dollar AS hingga 100 dollar AS untuk makanan, transportasi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Saat ini, setidaknya 70 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan kelas konsumen. Kelompok ini

diproyeksikan akan mencapai 135 juta orang pada 2030 atau setengah dari total penduduk Indonesia.

Sejak tahun 2000, kelas konsumen Indonesia sudah muncul dan terus berkembang kuat berkat pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir. Pendapatan mereka meningkat dikarenakan dua hal yakni kualifikasi pendidikan mereka tinggi dan permintaan pasar terhadap pekerja profesional terampil meningkat. Kelompok kelas konsumen ini berperan cukup penting bagi Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan pajak negara dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah semakin sulit mengakses lapangan kerja. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah.

Pemerintah (UU Nomor 32 tahun 2004) dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan mulai memberikan perhatian kewenangan kepada pemerintah daerah. Menurut UU tersebut, daerah otonom yang diberikan pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat punya hak untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya Pemerintah Pusat dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan pendanaan kepada daerah untuk mengelola serta membiayai kebutuhan daerah masing-masing. Kebijakan ini merupakan kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat ke setiap Pemerintah Daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keluasaan untuk mengelola sumber daya daerahnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut agar daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pada era desentralisasi ini, pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Dana transfer pusat digunakan untuk menstimulus fiskal untuk daerah dalam meningkatkan pembangunannya.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui sistem transfer ke daerah telah berlangsung selama lebih satu setengah dekade. Di satu sisi, jumlah dana transfer terus meningkat dan distribusinya relatif bias ke wilayah yang tertinggal dan luar Jawa-Bali, walaupun kontribusi perekonomian wilayah luar Jawa-Bali terhadap ekonomi nasional justru menurun dalam 15 tahun terakhir. Wilayah Jawa-Bali masih menjadi pusat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia adalah kebijakan transfer ke daerah, yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana insentif daerah.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan dan kemiskinan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam mengalokasikan Dana Desa yang meningkat signifikan tiap tahun pada periode 2015 sampai dengan 2019. Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp20,77 triliun, meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada tahun 2016, dan tahun 2017 alokasinya kembali meningkat menjadi Rp60 triliun, lalu pada tahun

2018 Rp60 triliun dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp70 triliun dengan total alokasi Dana Desa sebesar Rp257 triliun selama 5 tahun (2015-2019).

Dengan alokasi Dana Desa yang besar tersebut pemerintah mengharapkan adanya pemerataan pembangunan sebagai komitmen pemerintah yang tercantum dalam Nawacita. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka disalurkanlah Dana Desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015. Tujuannya antara lain mengentaskan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa (Kementerian Keuangan, 2017).

Setiap pengalokasian dana dari pemerintah (APBN) kepada daerah (APBD) sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk menambah kapasitas APBD-nya dalam mendukung tugas dan fungsi pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk melakukan *policy treatment* agar peningkatan kemampuan fiskal antardaerah dengan segala karakteristiknya di Indonesia berpengaruh positif terhadap capaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Saat ini, persoalan efektivitas penggunaan Dana Desa telah menjadi fokus perhatian publik. Hal tersebut tidak lepas dari harapan bahwa Dana Desa dapat menjadi sebagian solusi terhadap masalah ketersediaan infrastruktur di tingkat desa maupun persoalan pemberdayaan masyarakat desa. Walaupun harus disadari pula bahwa masalah tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya

dengan satu kebijakan. Sejalan dengan regulasi yang ada, secara peruntukan diskresi kewenangan penggunaan Dana Desa ada di level pemerintah desa sehingga menambah kapasitas APBDesa, namun jika dilihat secara utuh dalam konteks pemerintah daerah, maka alokasi Dana Desa pada dasarnya juga menambah kapasitas pemerintah daerah itu sendiri, khususnya terkait pelaksanaan tugas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dilimpahkan kepada pemerintah desa. Dalam kaitan ini, implementasi Dana Desa yang sudah berlangsung selama 5 tahun, adalah sesuatu yang penting untuk melihat sejauh mana efektivitas Dana Desa sebagai salah satu instrumen anggaran yang ada dalam mempengaruhi proses pembangunan di desa maupun pengurangan ketimpangan di desa.

Pengelolaan dana begitu besar yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah melalui otonomi daerah semestinya mampu memperbaiki perekonomian masyarakat setempat ke arah yang lebih baik. Namun, sistem desentralisasi yang dijalankan selama ini ternyata belum mampu untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat (Lestari, 2016). Selain itu, jumlah penduduk di suatu daerah sebagai faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mempengaruhi tingkat distribusi pendapatan.

Transfer fiskal dan penyaluran Dana Desa merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan undang-undang tentang desa yang bertujuan agar terjadi pemerataan pembangunan di seluruh daerah dan desa, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah.

Dengan distribusi pendapatan yang merata, kelompok berpendapatan rendah akan mengalami peningkatan pendapatan yang nantinya akan memudahkan mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan ekonomi. Selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan perbaikan kapasitas sumber daya manusia diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji mengenai **Pengaruh Transfer Fiskal dan Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh transfer fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembangunan manusia di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembangunan manusia di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh transfer fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembangunan manusia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembangunan manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai ketimpangan di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi pengambil kebijakan terkait dengan pengembangan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual

2.1.1 Konsep dan Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan. Ketimpangan pendapatan (*inequality of income*) berfokus pada distribusi pendapatan antar individu. Ketimpangan pendapatan juga memberikan gambaran mengenai nilai pendapatan individu dan rumah tangga terdistribusi dalam populasi. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan kemakmuran antara yang kaya dengan yang miskin. Selain masalah kemiskinan, persoalan ketimpangan menjadi perhatian banyak negara-negara di dunia dan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan termasuk di Indonesia.

Ketimpangan sebenarnya punya konsekuensi positif dan negatif. Secara positif, ketimpangan memunculkan motivasi pada diri seseorang untuk melampaui, berkompetisi, menyimpan, atau menginvestasikan sesuatu. Mereka juga cenderung bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Dalam perspektif yang lebih luas, adanya ketimpangan juga dapat memberikan dampak positif guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi (Eka Sastra, 2017).

Adanya ketimpangan akan memberikan insentif bagi setiap orang, termasuk kelompok masyarakat yang tertinggal untuk terus berusaha (termasuk menjadi wiraswasta) dan berinovasi dalam usaha (Lazear dan Rosen, 1981). Boleh jadi, insentif untuk menjadi wirausahawan sangat relevan untuk negara berkembang, dengan membiarkan setidaknya beberapa individu untuk

mengakumulasi kebutuhan minimal guna memulai usaha dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik (R.J.Barro, 2000).

Menurut Sukirno (2006), pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, dimana pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pendapatan yang pertama adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja dalam bentuk upah atau gaji dan besarnya tergantung dari tingkat produktivitas dan yang kedua merupakan pendapatan yang berasal dari sumber lain sewa, laba, bunga, hadiah atau arisan (Retnosari, 2006)

Seringkali keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang menuntut pemerintah untuk berusaha menciptakan

laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah memacu sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah yang besar dalam waktu singkat. Seiring dengan gerak pembangunan yang dilakukan, ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kemiskinan menjadi lingkaran masalah yang sulit untuk diatasi. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menggambarkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati sebagian besar pendapatan negara. Sebaliknya sebagian besar masyarakat yang terdiri dari karyawan dan buruh hanya menikmati sedikit dari pendapatan nasional (Djojohadikusumo, 1955). Ketimpangan distribusi pendapatan tersebut merupakan suatu masalah yang harus segera diatasi karena ketimpangan pendapatan berdampak bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam hal sosial. Todaro (2003) berpendapat bahwa ketimpangan yang ekstrim akan menimbulkan berbagai dampak antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

World Bank dalam artikel publikasinya terkait ketimpangan di Indonesia (2015) menyatakan bahwa, ketika masyarakat menyadari adanya jurang pendapatan dan kekayaan, maka potensi ketegangan sosial dan ketidakrukunan sangat mungkin terjadi sehingga dapat menimbulkan konflik. Memang terbukti bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan lebih rendah. Konflik tentunya dapat mengurangi

pertumbuhan ekonomi melalui gangguan tenaga kerja dan penurunan investasi. Dampak semakin buruk ketika ketimpangan disebabkan oleh perilaku cari untung sendiri, mencoba menguasai sumber daya yang ada tanpa menghasilkan kekayaan baru melalui kegiatan produktif. Oknum-oknum tertentu mencari perlakuan khusus dan perlindungan terhadap posisi mereka, sehingga menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya, korupsi dan nepotisme, yang semuanya dapat menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi, termasuk hilangnya kepercayaan terhadap lembaga publik.

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara yang semakin terbagi dan tidak setara dalam banyak hal. Terdapat kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara 10 persen warga terkaya dan populasi sisanya, didorong oleh banyak jenis ketimpangan di Indonesia. Masyarakat terbagi menjadi orang berpunya dan tidak berpunya bahkan sebelum dilahirkan. Hanya sebagian anak-anak terlahir sehat dan tumbuh dengan baik pada tahun-tahun pertama mereka. Demikian pula hanya sebagian anak mampu bersekolah dan mengenyam pendidikan berkualitas. Ini berarti sebagian besar tidak dapat memasuki lapangan kerja dengan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan ekonomi modern dan dinamis. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Banyak keluarga tidak memiliki akses ke jaring pengaman sosial yang dapat melindungi mereka dari berbagai guncangan yang melanda dalam hidup. Sejumlah kecil orang Indonesia yang beruntung memiliki akses ke aset keuangan dan fisik (seperti tanah dan properti) yang membuat kekayaan mereka meningkat seiring waktu. Kekayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk uang maupun aset fisik, dan melalui akses lebih besar pada

kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Alhasil, ketimpangan semakin berlipat ganda dan semakin lebar seiring berjalannya waktu.

Meskipun demikian, masih menjadi perdebatan apakah meningkatnya ketimpangan ini merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan atau konsumsi penting untuk akumulasi aset yang nantinya akan diinvestasikan pada kemajuan teknologi yang akan dibutuhkan untuk pertumbuhan jangka panjang. Ketimpangan pendapatan juga dianggap sebagai hasil dari perbedaan input, yaitu investasi dalam modal manusia, terutama pendidikan, dan ketimpangan itu dianggap perlu untuk memberikan insentif pasar bagi investasi tersebut.

Di sisi lain, ketimpangan pendapatan biasanya terkait erat dengan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya, antara lain ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik yang secara umum termanifestasi sebagai ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*). Dimensi-dimensi lain dari ketimpangan ini dianggap memiliki dampak yang secara signifikan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan, bahkan juga terhadap stabilitas sosial-politik. Beberapa kajian dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi berdampak buruk terhadap pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan (Perrson dan Tabellini, 1994, dan Benabou, 1996).

2.1.2 Indikator Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Terkait dengan ketimpangan, para peneliti ekonomi sering menggunakan beberapa model ukuran dalam memberikan gambaran dan menentukan tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Beberapa metode yang lazim digunakan adalah Indeks Gini dan ukuran Bank Dunia.

a. Indeks Gini

Indeks gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Menurut Todaro dan Smith (2006), kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan indeks gini dapat dilihat seperti table berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Ketimpangan Berdasarkan Indeks Gini

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
$X = 0$	Merata sempurna
$0 < x < 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < x < 0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$0,5 < x < 1$	Tingkat ketimpangan tinggi
$X = 1$	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)

Sumber : BPS 2018

Gini Ratio atau Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang memenuhi empat kriteria (Todaro dan Smith, 2006) yakni : (1) prinsip anonimitas (*anonymity principle*), merupakan ukuran ketimpangan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang

lebih tinggi. Dengan kata lain, ukuran tersebut tidak bergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin; (2) prinsip independensi skala (*scale independence principle*), merupakan ukuran ketimpangan kita seharusnya tidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau negara, atau cara kita mengukur pendapatannya. Dengan kata lain, ukuran ketimpangan tersebut tidak bergantung pada apakah kita mengukur pendapatan dalam mata uang atau apakah perekonomian negara itu secara rata-rata kaya atau miskin; (3) prinsip independensi populasi (*population independence principle*), merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk). Misalnya, perekonomian Cina tidak boleh dikatakan lebih merata dibandingkan perekonomian Vietnam hanya karena produk Cina lebih banyak; dan (4) prinsip transfer (*transfer principle*). Prinsip ini juga sering disebut sebagai prinsip Pigou Dalton. Prinsip ini menyatakan bahwa dengan mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya ke orang miskin (namun tidak sangat banyak hingga mengakibatkan orang miskin itu sekarang justru lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya tadi), maka akan dihasilkan pendapatan baru yang lebih merata.

b. Ukuran Bank Dunia

Cara lain yang juga sering diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia, dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yakni: (1) 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah; (2) 40

persen penduduk dengan pendapatan menengah; dan (3) 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi.

Kemudian berdasarkan kriteria ini, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Selain dari sisi pendapatan, pengukuran ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran. Karena data pengeluaran lebih mudah diperoleh, maka pengukuran ketimpangan menurut kriteria Bank Dunia ini lebih sering menggunakan data pengeluaran. Namun, pengukuran ketimpangan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran memiliki kelemahan antara lain data yang disajikan akan *underestimate* dibandingkan bila data yang dipergunakan adalah data berdasarkan pendapatan. Hal ini disebabkan adanya sebagian pendapatan yang tidak dibelanjakan dan disimpan sebagai tabungan (*saving*). Penyebab lainnya adalah adanya transfer pendapatan. Kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia yakni : (1) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi; (2) jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12%-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang atau menengah; dan (3) jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Transfer Fiskal

Transfer fiskal adalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membantu kinerja keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan mewujudkan pembangunan antar daerah yang merata. Transfer (*grants*) ini dapat digunakan untuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terus menerus untuk setiap tahun dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik, contohnya seperti belanja gaji dan honorarium pegawai. Sementara belanja pembangunan adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Belanja pembangunan sendiri ada yang berbentuk belanja pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, pengadaan jaringan listrik dan air minum, serta ada yang berbentuk belanja non fisik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan keamanan masyarakat.

Menurut Prakosa (2004), salah satu transfer yang paling penting bagi daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan besaran yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto dalam APBN. Selanjutnya, proporsi antara DAU provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangannya 10 persen dan 90 persen.

Perhitungan DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu jumlah dari selisih kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat kepada setiap daerah. Daerah yang memiliki kebutuhan fiskal lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan kapasitas fiskal, maka akan menerima alokasi DAU yang relatif besar agar dapat memberikan pelayanan dasar yang memadai. Sebaliknya, daerah yang sudah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dibandingkan kebutuhan fiskalnya, akan menerima alokasi DAU yang lebih kecil. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Terlepas dari sistem pemerintahannya, transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia (Fisher, 1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Nemec dan Wright, 1997). Tujuan utama dari implementasi transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antardaerah (Oates, 1999). Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah akan selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999).

Menurut Rosen & Gayer (2010) Secara umum terdapat dua jenis transfer, yaitu: Transfer bersyarat (*Conditional Grants*) dan Transfer Tidak Bersyarat (*Unconditional Grants*). Transfer bersyarat merupakan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Pusat. Transfer tidak bersyarat merupakan transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang pengelolaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah dan diawasi oleh pemerintah pusat. Transfer ini bertujuan untuk pemerataan pendapatan antar daerah dan merupakan dana pendukung pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Pemerintah Pusat juga menetapkan tujuan yang spesifik dalam penggunaan dana transfer bersyarat.

2.2.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam komponen fiskal (*government expenditure*), transfer Dana Desa merupakan bentuk dari kebijakan fiskal oleh pemerintah dalam mengatur aktivitas perekonomian negara. Pemerintah melalui kebijakan penganggarannya selalu berusaha untuk mendorong aktivitas perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Menurut Sajafii (2009) dalam Wahyuni, dkk (2014), pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap GNP yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif atautkah secara absolut. Apabila yang dimaksud Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman dan Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas (Tandiawan, dkk, 2012).

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002). Pengeluaran Pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran pemerintah mempertimbangkan yakni : (1) pajak yang diharapkan akan diterima; (2) pertimbangan politik; dan (3) permasalahan yang dihadapi (Samuelson & Nordhaus, 2001).

Sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016, Dana Desa yang ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini diberikan kepada desa dengan pembagian 90 persen porsi yang dibagi rata (alokasi dasar) dan 10 persen dari porsi berdasarkan formula (alokasi formula). Adapun tujuan dari pemberian dana desa, yakni : (1) mengentaskan kemiskinan; (2) memajukan perekonomian desa; (3). meningkatkan pelayanan publik desa; (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun, dalam rangka mengawal dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Prinsip penggunaan dana desa tersebut yakni : (1) swakelola dan berbasis sumber daya

desa; (2) keadilan; (3) kebutuhan prioritas; (4) kewenangan desa; (5) partisipatif; (6); dan tipologi desa.

Kebijakan Dana Desa dalam upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui penyesuaian besaran alokasi yang diantaranya memperhatikan jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Prioritas penggunaan Dana Desa kemudian diarahkan dalam dua bidang utama yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Transfer Fiskal dengan Ketimpangan Pendapatan

Sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam komponen fiskal (*government expenditure*), transfer fiskal memiliki hubungan yang tidak langsung dengan ketimpangan pendapatan. Pengeluaran pemerintah adalah bentuk kebijakan fiskal untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah setiap tahun yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Aghion (1999) menjelaskan secara khusus, transfer pemerintah merupakan sumber terbesar kedua bagi peningkatan pendapatan rumah tangga. Walaupun pertumbuhan ekonomi penting untuk menurunkan ketimpangan, kebijakan pemerintah jenis fiskal ini juga memegang peranan yang krusial. Oleh karena itu, adanya transfer fiskal yang diberikan ke daerah di Indonesia kemudian menjadi sangat penting guna mendorong kesejahteraan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat dengan mengurangi jurang ketimpangan pendapatan.

Fisher (1996) menjelaskan bahwa transfer fiskal atau transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya. Menurut Nemec dan Becker (1997) transfer fiskal menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan antara pusat dan daerah. Tujuan utama dari implementasi transfer adalah untuk menginternalisasi eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan antar daerah (Oates, 1999).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Hale Balseven dan Can Tansel Tugcu (2017)* yang meneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap distribusi pendapatan di negara maju dan berkembang. Adapun hasil penelitian menemukan, pendapatan pajak mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di negara-negara berkembang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi berdampak negatif pada distribusi pendapatan di negara-negara berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi berdampak positif pada distribusi pendapatan di negara maju.

Penelitian yang dilakukan oleh Leonel Muinelo-Gallo & Oriol Roca-Sagalés (2014) tentang, apakah kebijakan fiskal meningkatkan ketimpangan penghasilan di Uruguay, menemukan adanya efek Keynesian jangka panjang yang penting terkait dengan pengeluaran publik, dan bahwa struktur pengeluaran negara, sebagian mempunyai efek untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Subarna K. Samanta & J. Georg Cerf (2009) yang meneliti tentang Distribusi Pendapatan dan Efektivitas Kebijakan fiskal

menunjukkan bahwa distribusi pendapatan harus diperlakukan sebagai alat utama untuk merumuskan kebijakan fiskal. Bukti empiris menunjukkan bahwa dampak distribusi pendapatan dari kebijakan fiskal menunjukkan angka yang negatif dengan mempertimbangkan analisis panel data negara-negara transisi dan berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Harry Azhar Aziz, Nisful Laili, Gigih Prihantono (2016) meneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai redistribusi kabupaten/kota negatif, menunjukkan bahwa redistribusi melalui pajak tidak efektif. Dalam prakteknya, sistem perpajakan yang berlaku cenderung memperlebar ketimpangan pendapatan. Hubungan antara pendapatan ekuitas dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang lebih besar di wilayah dengan pendapatan tinggi, sedangkan di daerah dengan pendapatan rendah, pengaruh tersebut memang sangat kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Angeles Sanches & Antonio L Peres (2016) yang berjudul Pengeluaran Sosial Pemerintah dan Ketimpangan Pendapatan di Uni Eropa, menganalisis hubungan antara pengeluaran sosial publik dan distribusi ketimpangan pendapatan di 28 Negara Anggota Uni Eropa, sepanjang periode 2005-2014. Dengan menggunakan model panel dinamis, menunjukkan adanya korelasi negatif antara pengeluaran sosial publik secara keseluruhan dan ketimpangan pendapatan.

Di negara-negara berkembang, pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran untuk perlindungan sosial berhubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan, dan di negara-negara lain, fungsi redistributif ini

dilakukan hanya dengan pengeluaran untuk perlindungan sosial. Pengeluaran untuk pendidikan tidak secara signifikan terkait dengan ketimpangan pendapatan di kelompok negara yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Nor Qomariyah (2016) yang berjudul dampak transfer fiskal (*conditional grant*) terhadap pembangunan pertanian, kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berupa *conditional grant* terhadap pembangunan pertanian, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Dengan menggunakan model persamaan simultan dengan data *time series* tahun 2009-2013 dan data *cross section* pada 11 provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAK jalan dan irigasi dapat meningkatkan kinerja fiskal, sektor PDRB pertanian, total PDRB, dan total penyerapan tenaga kerja, tetapi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menurun disebabkan adanya kenaikan upah, menurunkan ketimpangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah pusat hendaknya meningkatkan injeksi dana langsung ke daerah lewat dana alokasi khusus (DAK) bidang infrastruktur karena dampaknya efektif menurunkan kemiskinan.

Berdasarkan uraian teoritis dan penelitian di atas, penulis meyakini bahwa secara umum transfer fiskal memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga transfer fiskal akan menurunkan ketimpangan pendapatan hingga terjadi pemerataan pendapatan.

2.3.2 Hubungan Dana Desa dan Ketimpangan Pendapatan

Dana Desa sebagai salah satu bentuk dari pengeluaran pemerintah salah satu tujuan penggunaannya adalah membiayai kebutuhan dan keperluan pemerintahan di tingkat desa. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002).

Pengeluaran Pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran pemerintah yakni : (a) pajak yang diharapkan akan diterima; (b) pertimbangan politik; dan (c) permasalahan yang dihadapi (Samuelson & Nordhaus, 2001).

Andi Setiawan (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa sejak diberlakukannya Dana Desa, ketimpangan di pedesaan menunjukkan adanya pengurangan. Hasil penelitiannya juga menunjukkan adanya penurunan ketimpangan pedesaan sebesar 0,0125 sejak diberlakukannya Dana Desa, rasio gini secara umum menunjukkan penurunan. Digulirkannya Dana Desa mampu mengurangi ketimpangan pengeluaran di pedesaan. Hal ini diduga terdapat peningkatan pendapatan rumah tangga melalui penggunaan dana desa terutama di bidang pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Terdapat hubungan linier positif tingkat kemiskinan dan kesenjangan sesudah digulirkannya Dana Desa, sedangkan sebelumnya tidak ada hubungan linier yang nyata. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Dana Desa punya pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di desa.

Berdasarkan uraian teoritis dan penelitian di atas, penulis meyakini bahwa secara umum Dana Desa memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, dalam hal ini Dana Desa akan menurunkan ketimpangan pendapatan dan menciptakan pemerataan pendapatan.

2.3.3 Hubungan Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki produktifitas tinggi sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan secara agregat dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Tjiptoherijanto, 1996).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup seperti umur panjang, pendidikan dan standar hidup atau pendapatan. Dengan menggunakan IPM, akan mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia (Todaro dan Smith, 2004).

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya

produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004). Pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau dalam ilmu ekonomi lazim disebut mutu modal manusia (Ranis, 2004). Peningkatan kualitas modal manusia dapat tercapai apabila memperhatikan 2 faktor penentu yang seringkali disebutkan dalam beberapa literatur, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Menurut Becker (1964), menyatakan bahwa pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori *human capital*, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa, pembangunan manusia yang baik akan berpengaruh menurunkan ketimpangan atau pembangunan manusia yang baik berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.

2.3.4 Hubungan Transfer Fiskal, Dana Desa dan Ketimpangan Pendapatan

Salah satu tujuan diberlakukannya kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal harus meningkatkan pendapatan nasional dan mendistribusikan kembali pendapatan

nasional itu sehingga ketimpangan ekstrim dalam pendapatan dan kesejahteraan di dalam perekonomian dapat berkurang.

Sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam komponen fiskal (*government expenditure*), dana desa dan transfer fiskal memiliki hubungan yang tidak langsung dengan ketimpangan. Pengeluaran pemerintah adalah bentuk kebijakan fiskal untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah setiap tahun yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Adapun manfaat dari kebijakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga, tingkat output, maupun membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan tingkat pendapatan yang bisa diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah atau PDB di tingkat nasional. Adanya peningkatan pendapatan tersebut, turut serta memengaruhi kondisi kesejahteraan suatu masyarakat. (Andi Ilham Mulya Adam, 2018).

Dana Desa dan transfer fiskal memiliki peran strategis menopang kinerja seluruh pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas dan pemeratakan pelayanan dasar publik, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Kemenkeu, 2018). Anggaran Dana Desa yang digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan akan mendorong peningkatan pembangunan serta kesejahteraan

yang akan dirasakan masyarakat daerah. Program Dana Desa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa bersifat swakelola dan padat karya, sehingga sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian dan pendapatan masyarakat desa. Cara tersebut mengutamakan pemanfaatan sumber daya/bahan baku lokal serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dari masyarakat desa setempat.

Oleh karena itu, Dana Desa juga turut berperan memperkecil *gap* distribusi pendapatan antar golongan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, berbagai upaya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan dan kepentingan publik, yaitu secara langsung dapat berupa pembayaran transfer dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya (Todaro, 2003).

Pembangunan manusia yang dilakukan pemerintah berperan dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga turut memperbaiki tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik. Tingkat kesejahteraan dapat meningkat seiring dengan adanya peningkatan pendapatan. PDRB yang tumbuh juga dapat mencerminkan terbukanya kesempatan penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah. Pada daerah yang perekonomiannya bersifat padat karya, adanya perubahan lebih besar dalam permintaan terhadap barang dan jasa membuat pelaku ekonomi membutuhkan input seperti tenaga kerja untuk mendorong produksi yang lebih besar. Hal tersebut berperan dalam membuka banyak kesempatan lapangan kerja lebih luas sehingga diharapkan dapat membantu

masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya dan turut mengurangi terjadinya ketimpangan pendapatan.

2.3.5 Hubungan Transfer Fiskal, Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan

Di era desentralisasi fiskal pemerintah pusat melakukan pembagian fiskal ke daerah dengan tujuan agar terjadi keseimbangan fiskal antara pusat daerah. Era desentralisasi juga berarti memberikan kewenangan dan keluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya secara otonom.

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat (Bappenas, 2007). Menurut UND (1990), indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kewenangan pemerintah daerah tersebut agar daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pada era desentralisasi, pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Dana transfer pusat digunakan untuk menstimulus fiskal untuk daerah dalam meningkatkan pembangunannya. Dana transfer pusat yang berfungsi sebagai penyeimbangan keuangan antar daerah dan peningkatan pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diberikan kepada daerah dalam membiayai kebutuhan khusus yang menjadi prioritas nasional. Pemberian DAK berdasarkan bidang yang dijadikan prioritas nasional seperti bidang pendidikan,

kesehatan, infrastruktur dan lainnya. Pemberian dana transfer tersebut diharapkan menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah.

Perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan di Indonesia tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran 20 persen dari total APBN dan APBD. Dalam merencanakan pemanfaatan anggaran 20 persen, pemerintah menguraikan kebijakan pendidikan ke dalam beberapa program yang dipandang menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan. Prioritas penggunaan anggaran sebanyak 20 persen dari APBN bidang pendidikan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yang berujung pada perbaikan kualitas pembangunan manusia.

Menurut Todaro dan Smith (2004), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain, paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan. IPM juga menunjukkan bahwa pembangunan yang kita maksud adalah pembangunan manusia dalam arti luas bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya fungsi produksi namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental.

Modal manusia atau pembangunan manusia memiliki peranan strategis dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Appleton dan Teal (1998) merangkum setidaknya ada tiga dampak utama diabaikannya modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) investasi yang rendah dalam modal manusia akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan; (2) bahwa modal manusia, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan memiliki keterkaitan yang sangat erat; (3) sebagai konsekuensi dari keterkaitan modal manusia dengan kesejahteraan, maka modal manusia memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pendapatan namun merupakan fungsi dimensional yang mencakup kesehatan dan pendidikan.

Mincer (1981) menjelaskan bahwa pendidikan menjadi alat intervensi publik untuk tujuan distribusi, dengan membantu anak-anak miskin mendapatkan kemampuan minimal untuk mendapatkan penghasilan. Maka tugas pemerintah adalah menciptakan lingkungan yang mendorong akumulasi modal manusia yang akan memberikan manfaat bagi individu dan pada akhirnya negara (Matovac et al., 2010).

Dalam konteks Indonesia, peran modal mendapatkan posisi penting dalam kebijakan pemerintah dari setiap pemerintahan. Modal manusia yang diterjemahkan ke dalam variabel pendidikan dan kesehatan selalu menjadi prioritas nasional karena pemerintah menyadari betul pentingnya modal manusia untuk mendorong daya saing yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Esta Lestari, 2020).

Sebagai negara berkembang yang masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah, capaian daya saing di Indonesia masih dikatakan

cukup rendah akibat rendahnya kualitas modal manusia. WEF (2015) melaporkan bahwa posisi Indonesia dalam *Global Competitiveness Index* berada pada peringkat 34 yang memasukkan Indonesia pada tahapan pembangunan yang berbasis efisiensi. Dari enam pilar yang menyokong *efficiency-driven economy* terdapat dua pilar yang sangat berhubungan dengan modal manusia yaitu pilar pendidikan tinggi dan pelatihan dan efisiensi pasar tenaga kerja.

Fahmi (2014) menyebutkan terdapat beberapa permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendesak bagi Indonesia, meliputi (1) rendahnya angka partisipasi sekolah menengah, (2) rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi, (3) rendahnya kualitas sistem pendidikan dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja, (4) rendahnya ketersediaan lembaga riset dan pelatihan berkualitas, (5) rendahnya kualitas sekolah bisnis. Keseluruhannya menjadikan rendahnya daya saing Indonesia dan pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya ketimpangan pendapatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan tertinggi yang dialami Indonesia sepanjang masa reformasi sebesar 0,43 ditahun 2014 yang diklaim sebagian besar pihak *underestimate*. Menurut Bank Dunia (2015a), data Susenas cenderung kurang akurat untuk 8% rumah tangga teratas (2,5%) yang berarti koefisien Gini meningkat menjadi 0,59. Temuan World Bank terakhir (2015b) menunjukkan kenyataan yang lebih mencengangkan, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia setelah Rusia dan Brazil, di mana 1% penduduk terkaya menikmati 51% pendapatan nasional. Salah faktor utama yang berkontribusi pada meningkatnya

ketimpangan adalah rendahnya akses pendidikan dan kesehatan pada kelompok miskin.

2.4 Tinjauan Empiris

Sejumlah penelitian-penelitian terkait dengan pengaruh transfer fiskal, dana desa terhadap ketimpangan pendapatan masih terus dilakukan baik yang berupa pengujian hipotesis maupun pengembangan teori lebih lanjut. Berikut ini adalah peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian :

Balseven dan Tugcu (2017) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh dari kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan dengan membandingkan negara maju dan negara berkembang. Hasil analisis menunjukkan transfer fiskal yang dilakukan pemerintah pusat dapat meningkatkan *gini ratio* negara berkembang. Sedangkan transfer fiskal pada negara maju berhasil menurunkan *gini ratio*.

Penelitian yang dilakukan oleh Angeles Sanches & Antonio L Peres (2016) yang berjudul Pengeluaran Sosial Pemerintah dan Ketimpangan Pendapatan di Uni Eropa, menganalisis hubungan antara pengeluaran sosial publik dan distribusi ketimpangan pendapatan di 28 Negara Anggota Uni Eropa, sepanjang periode 2005-2014. Dengan menggunakan model panel dinamis, menunjukkan adanya korelasi negatif antara pengeluaran sosial publik secara keseluruhan dan ketimpangan pendapatan. Di negara-negara berkembang, pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran untuk perlindungan sosial berhubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan, dan di negara-negara lain, fungsi redistributif ini dilakukan hanya dengan pengeluaran untuk

perlindungan sosial. Pengeluaran untuk pendidikan tidak secara signifikan terkait dengan ketimpangan pendapatan di kelompok negara yang diteliti.

Penelitian lain yang dilakukan Hermana (2011) menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil temuan Suriani dan Saifunnizar (2014) di provinsi Aceh. Dana perimbangan yang diberikan mampu menurunkan ketimpangan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pemerataan distribusi pendapatan yang secara umum sudah sangat merata. Sementara itu Usman (2006) dalam studinya menemukan bukti bahwa era desentralisasi fiskal memang meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian namun dampaknya dari segi perbaikan distribusi pendapatan baru sebatas indikasi karena belum terbukti secara nyata.

Wu et al. (2006) dengan menggunakan estimasi model REM menganalisis peran dari pajak, tranfer pemerintah, dan program kesejahteraan terhadap ketimpangan pendapatan di 50 Negara Bagian Amerika Serikat. Mereka menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang paling penting dalam pendistribusian pendapatan di daerah perkotaan ketimbang pedesaan. Sebaliknya, transfer pemerintah dan program kesejahteraan lebih efektif dalam pendistribusian pendapatan di daerah pedesaan ketimbang perkotaan.

Sementara itu, penelitian Wardhana (2013) bertujuan untuk melihat hubungan transfer pemerintah pusat terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan variabel yang signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Akan

tetapi, analisis yang dilakukan oleh Putri dan Natha (2015) menunjukkan hal yang sebaliknya. Penelitian tersebut menemukan hubungan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kenaikan ketimpangan pendapatan secara parsial. Penelitian yang dilakukan oleh Sriningsih dan Yasin (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi penyebaran DAU setiap daerah dari nilai rata-rata seluruh daerah maka semakin tinggi pula kesenjangan antar kabupaten/kota.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina (2015) dengan judul pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi negara dengan desain runtut waktu, data sekunder yang digunakan mencakup periode dari tahun 2004 sampai 2013 menemukan bahwa bahwa pengeluaran yang dilakukan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menyarankan bentuk-bentuk pengeluaran maupun investasi oleh pemerintah sebagai bentuk kebijakan fiskal harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi misalokasi atau ketidakmerataan pendistribusian antarsektor pembangunan, mengingat pentingnya peran yang dimilikinya sebagai pending pertumbuhan ekonomi nasional.

Rusydi (2012) dalam penelitiannya yang menganalisis pengaruh dari alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa membuktikan bahwa anggaran dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar. Pola hubungan antara alokasi dana desa dengan kesejahteraan masyarakat yang diproyeksi dari PDRB perkapita dianalisis menggunakan analisis regresi. Dari hasil estimasi ditemukan hubungan yang sangat kuat antara penganggaran dana desa tersebut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, Setianingsih (2016) mencoba menganalisis kontribusi dari Dana Desa dalam menurunkan angka kemiskinan di 169 desa di Kabupaten Melawi pada tahun 2015. Salah satu tujuan penelitian tersebut adalah ingin mengetahui pengaruh dari dana desa lewat pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian tersebut menggunakan penelitian dalam bentuk eksplanatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan memberikan penjelasan tentang mengapa sesuatu atau gejala dapat terjadi. Hasilnya menunjukkan dana desa yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Melawi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abdullah (2017) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulung Agung pada tahun 2015 dan 2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi dengan data panel. Berdasarkan hasil analisis dengan model FEM, dana desa dan ADD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dana desa dan ADD efektif mengurangi kemiskinan di 13 desa Kabupaten Tulung Agung. Sedangkan pada 114 Desa lainnya, dana desa dan ADD tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan proporsi penggunaan dana desa sebagian besar untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan, bukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Mahfudz (2009) menyatakan sebagian besar penggunaan alokasi dana desa lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik) dan penambahan kesejahteraan perangkat desa

dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Gumilang (2017) mencoba menganalisis dampak dari alokasi dana desa terhadap kemiskinan yang ada di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam analisis tersebut adalah metode deskriptif dan model ekonometrik data panel untuk melihat hubungan antarvariabel. Hasil studi ini menunjukkan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menunjukkan, pemberian ADD untuk 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan daerah. Sementara itu dalam penelitian lain, hubungan yang berbeda ditunjukkan oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Kabuapten/Kota Jawa Timur. Penelitian tersebut dilakukan oleh Susilowati et al. (2017) dengan menggunakan regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan variabel alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan dana desa justru berpengaruh positif terhadap kemiskinan Kabupaten/kota.

Studi yang terkait dengan transfer fiskal dilakukan di India oleh Fan, Zhang, & Zhang (2002), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur pertanian (pengeluaran untuk R & D, irigasi), pendidikan dan pembangunan pedesaan, termasuk jalan dan listrik telah berkontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas pertanian dan sebagian besar juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Selain itu kesenjangan infrastruktur antar daerah juga akan menyebabkan kesenjangan pendapatan antar daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan Akai dan Sakata (2005), desentralisasi fiskal merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Akai dan Sakata (2005) menjelaskan pada sistem sentralistik pelaksanaan untuk mendistribusikan sumber daya daerah yang kaya ke daerah yang miskin dan dapat mengurangi kesenjangan, tetapi pada sistem otonomi daerah bukan berarti dampak kesenjangan sosial lebih besar dibanding sistem sentralistik, dalam sistem otonomi diharapkan daerah akan lebih intensif untuk memajukan daerahnya dengan melakukan kebijakan – kebijakan untuk pembangunan ekonomi.

Andi Ilham Mulya Adam (2018), menemukan hal yang berbeda dalam penelitiannya terkait pengaruh transfer fiskal dan Dana Desa terhadap ketimpangan pendapatan . Dengan menggunakan data Dana desa dan DAU yang dianggarkan oleh pemerintah tahun 2011-2016, penelitian tersebut menemukan gap rata-rata ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dan non 3T menjadi lebih kecil setelah diterapkannya kebijakan Dana Desa. Pada kategori daerah, Kebijakan dana desa menyebabkan ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota non 3T lebih kecil, tetapi pada kabupaten/kota 3T justru sebaliknya. Sementara untuk DAU, anggaran yang diberikan kepada daerah 3T terbukti dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Sedangkan pemberian DAU untuk daerah non 3T justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Studi atau penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh yang beragam dari dampak transfer fiskal dan Dana Desa terhadap berbagai indikator pembangunan dan ketimpangan. Perbedaan yang diangkat dalam

penelitian ini adalah selain ingin melihat dampak dari adanya transfer fiskal terhadap ketimpangan pendapatan, peneliti ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dampak kebijakan pemerintah melalui transfer fiskal dan penyaluran dana desa ke daerah ini dapat memengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia. Selain itu, peneliti ingin melihat sejauh mana pengaruh Dana Desa sejak dikururkan pada tahun 2015. Aliran Dana Desa yang langsung bersumber dari APBN sangat menarik untuk diteliti karena kebijakan Pemerintah Pusat ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa secara langsung untuk menggunakan Dana Desa sebagai sumber pendapatan desa. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai program-program yang bersifat produktif dan meningkatkan pembangunan desa di Indonesia.

Selain itu, penelitian sebelumnya belum ada yang mencoba menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah adanya Dana Desa terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia sehingga peneliti mengambil studi kasus yang berfokus pada ketimpangan di 33 Provinsi se Indonesia.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Persoalan ketimpangan pendapatan saat ini terus menjadi masalah yang menjadi fokus utama negara-negara di belahan dunia khususnya di negara berkembang saat ini. Masalah ketimpangan pendapatan, selain berdampak langsung pada kesejahteraan dan akses terhadap layanan dasar kehidupan, ketimpangan juga bisa berakibat pada instabilitas ekonomi, sosial, politik dan pembangunan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks dan merupakan isu penting karena dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan di suatu negara, maka akan berdampak pada perekonomian negara. Apabila kondisi perekonomian menurun akibat ketimpangan pendapatan, maka akan mengakibatkan beragam masalah tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi masyarakat.

Intervensi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan tentu sangat diharapkan melalui berbagai kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan transfer fiskal diharapkan bisa menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Dana Desa diharapkan menjadi langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa yang selanjutnya dapat mendorong pencapaian target pembangunan nasional. Dana Desa yang telah dialokasikan dalam APBN sejak tahun 2015 merupakan wujud komitmen pemerintah atas amanah UU Nomor 24/2014 tentang Desa dalam menyediakan salah satu sumber pendapatan bagi desa. Dengan demikian, kedudukan desa dan

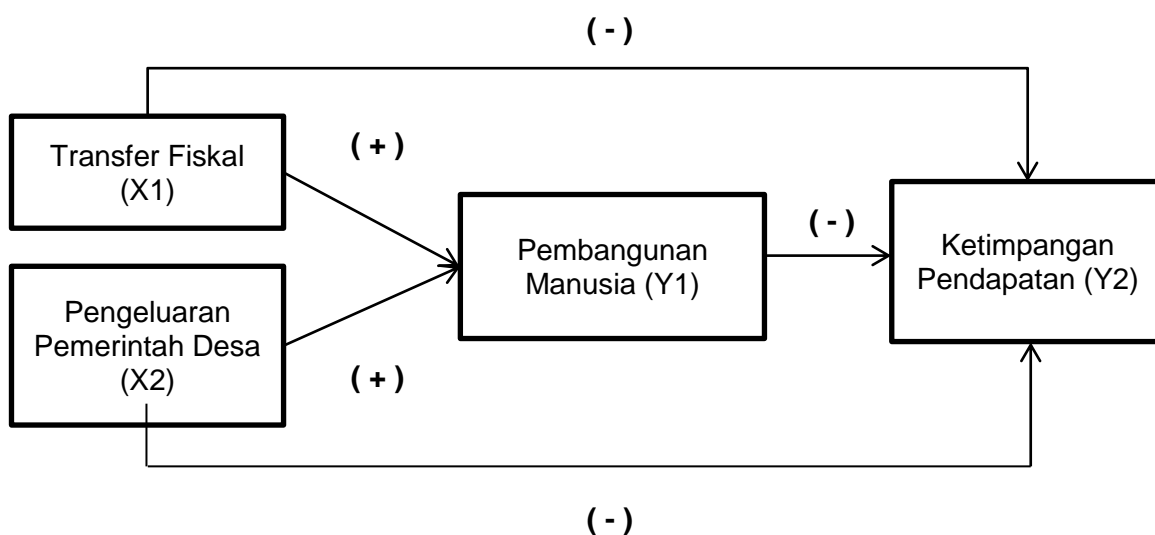
masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, adanya kebijakan transfer fiskal sebagai stimulus pembangunan dari pusat ke daerah, salah satu tujuannya adalah pemerataan distribusi pembangunan dan penurunan ketimpangan pendapatan di daerah.

Pembangunan manusia dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Tujuan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah melalui pemenuhan dasar kebutuhan manusia yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya pembangunan manusia diharapkan mampu berdampak bagi pertumbuhan ekonomi sehingga tercapai pembangunan daerah yang adil dan merata.

Selain melihat pengaruh dari Dana Desa dan transfer fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, penelitian ini juga ingin melihat pengaruh dari faktor lain yaitu pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pengaruh dari faktor-faktor ini kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif (ekonometrik) dengan metode data panel. Hasil dari analisis tersebut akan digunakan untuk memberi masukan dalam bentuk implikasi kebijakan bagi pemerintah untuk dapat mendorong pembangunan daerah yang berkualitas dengan adanya penyaluran anggaran dana desa dan transfer fiskal ini. Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Secara skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran



3.2 Hipotesis

Berdasarkan review teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga transfer fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembangunan manusia di Indonesia.
2. Diduga dikurkannya Dana Desa berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembangunan manusia di Indonesia.